

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar Penelitian**

##### ***2.1.1 RBV Theory (Resource Based View)***

Teori RBV, yang diusung oleh Barmey (1992), menyoroti kemampuan sebuah bisnis untuk mencapai kinerja unggul serta daya saing yang berkelanjutan melibatkan perolehan sumber daya yang bernilai tambah dan ditandai dengan karakteristik yang sulit diimitasi oleh pesaing. Dalam pandangan ini, sumber daya termasuk aset fisik, teknologi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Pemahaman bahwa keunggulan kompetitif tidak hanya berasal dari kepemilikan sumber daya tetapi juga dari kemampuan mengelolanya menjadi esensi teori ini (Ruli & Hilmawati, 2021)

Keunikan teori RBV terletak pada penekanannya pada kemampuan perusahaan untuk menyerap dan menerapkan sumber daya yang dimilikinya. Ini menciptakan tuntutan bagi perusahaan untuk tidak hanya memiliki sumber daya yang bernilai tetapi juga untuk secara efektif mengintegrasikannya ke dalam strategi operasional mereka. Kemampuan adaptasi dan inovasi menjadi krusial, memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar dan memanfaatkan peluang yang muncul. dalam konteks inklusi keuangan dan literasi keuangan, teori RBV memberikan perspektif yang menarik. Keduanya dianggap sebagai sumber daya internal yang dapat menyokong keunggulan dalam persaingan dan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan melibatkan pemanfaatan inklusi

keuangan untuk memberikan akses yang lebih optimal ke layanan keuangan. Sementara itu, peningkatan literasi keuangan memperkuat kapasitas perusahaan dalam efektif mengelola aspek keuangan mereka. Dengan demikian, untuk mencapai keunggulan bersaing, suatu perusahaan seharusnya memahami serta mengoptimalkan pemanfaatan inklusi keuangan dan literasi keuangan sebagai komponen integral dari strategi bisnis yang mereka terapkan.

## **2.1.2 Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

### **2.1.2.1 Pengertian Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah**

Kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil pencapaian atau prestasi yang termanifestasikan melalui kemampuan kerja. Dengan merinci definisi ini, Dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merujuk pada kemampuan alias prestasi yang berhasil tercapai dalam pelaksanaan tindakan khusus (Riyanto, 2019). Pada sektor Mikro, Kecil, dan Menengah diilustrasikan bidang bisnis melibatkan unit bisnis berukuran mikro hingga menengah, mencakup kategori sektor mikro, kecil, dan menengah. Pada kerangka keuangan sebuah negeri, sektor Mikro, Kecil, dan Menengah memainkan berperan krusial dengan kontribusi yang berarti kepada perkembangan keuangan negara. Di samping itu, mereka Memegang peran yang signifikan dalam menciptakan peluang kerja, membantu mengatasi tingkat pengangguran, dan mempromosikan inklusi sosial dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Kriteria UMKM dapat bervariasi tergantung pada definisi yang diadopsi oleh lembaga pemerintah. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, UMKM adalah unit usaha yang memiliki keunikan tersendiri, termasuk total aset atau nilai

penjualan tahunan seperti dengan standar pemerintah, dan dikelola oleh warga negara Indonesia. Direktorat Jendral Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah memberikan definisi yang mengaitkan UMKM dengan jumlah pekerja dan aset tertentu, sementara Peraturan Menteri Koperasi dan UKM lebih menekankan pada batasan jumlah aset untuk setiap kategori usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pentingnya definisi ini terletak pada kemampuannya untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan usaha berdasarkan skala mereka, memfasilitasi perumusan kebijakan pemerintah, dan mendukung implementasi dukungan yang sesuai bagi bidang UMKM. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM dapat menjadi lebih tepat sasaran, Memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masyarakat secara holistik, penelitian ini berfokus pada usaha mikro, dengan variabel dependen diukur melalui sejumlah indikator (Utami, 2023), berikut:

1. Pertumbuhan penjualan
2. Pertumbuhan keuntungan / laba
3. Ketepatan waktu dalam melunasi hutang / kewajiban

#### **2.1.2.2 Jenis Usaha Mikro Kecil Menengah**

Merujuk pada definisi sektor Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Indonesia, 2008), definisi dari ketiga jenis usaha tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro, Dalam kerangka peraturan ini, mengacu pada kegiatan menghasilkan yang dimiliki baik oleh perseorangan maupun badan usaha.

Definisi tersebut menegaskan bahwa suatu entitas dapat tergolong sebagai usaha mikro apabila memenuhi sejumlah kriteria yang telah dijabarkan dalam regulasi yang relevan.

2. Usaha kecil, Sesuai dengan penjelasan yang telah dijabarkan pada UU ini, merujuk pada aktifitas perekonomian produktif yang beroperasi dengan mandiri, tanpa ketergantungan sebagai entitas anak atau cabang dari suatu perusahaan menengah atau besar. Definisi ini menegaskan bahwa suatu entitas dapat dikategorikan sebagai usaha kecil apabila memenuhi sejumlah kriteria yang telah diatur oleh UU tersebut.
3. Usaha menengah merupakan entitas keuangan profit yang berdiri secara mandiri, dijalankan dengan perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari entitas usaha skala kecil atau besar. Entitas ini wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku agar dapat tergolong sebagai usaha menengah.

Terkait dengan aspek kekayaan dan hasil penjualan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No 20 Tahun 2008 (Indonesia, 2008), sebagai berikut:

1. Usaha mikro, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2008, Pasal 6 mempunyai ciri khas dimana kekayaan bersihnya tidak melebihi jumlah Rp 50.000.000,- dengan pengecualian memiliki karakteristik di mana hasil penjualan tahunannya tidak melebihi jumlah sebesar Rp300.000.000.
2. Usaha kecil, menurut ketentuan yang diamanatkan oleh UU No 20 Tahun 2008, Pasal 6, memiliki ciri khas dimana total *asset* sebesar Rp 50.000.000,-

namun tidak melebihi Rp 500.000.000,- dengan pengecualian mempunyai karakteristik di mana hasil penjualan tahunannya sebesar Rp300.000.000 Namun, tidak melampaui nilai sejumlah Rp 2.500.000.000,-

3. Usaha menengah, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No 20 Tahun 2008, Pasal 6, mempunyai karakteristik dengan total *asset* sejumlah Rp 500.000.000,- Pengecualian berlaku jika entitas tersebut memenuhi syarat khusus, di mana pendapatan penjualan tahunan mencapai Rp 2.500.000.000,- namun tidak melewati angka Rp 50.000.000.000,-

Menurut Karakteristik UMKM dari Bank Indonesia (BI), UMKM memiliki beberapa aspek :

1. Modal yang dimiliki tidak melebihi Rp. 20.000.000.
2. Kebutuhan dana untuk satu siklus periode usaha sekitar Rp. 5.000.000.
3. Nilai aset perusahaan tidak melebihi batas tertinggi sebesar Rp 600.000.000,- dengan pengecualian tanah serta bangunan dari perhitungan tersebut.
4. Pendapatan tahunan perusahaan tidak melampaui angka Rp. 1.000.000.000.

Dalam terminologi yang digunakan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM didefinisikan sebagai entitas bisnis yang telah memenuhi parameter berikut:

1. Memiliki batas maksimum aset sebesar Rp 600.000.000, dengan pengecualian nilai tanah serta bangunan.
2. Modal kerja yang dimiliki berada di bawah angka Rp 25.000.000.

3. Departemen Keuangan merinci definisi UMKM sebagai perusahaan yang mempunyai omset tahunan dengan maksimum Rp 600.000.000,-
4. *Asset* maksimum sebesar Rp 600.000.000,- dengan pengecualian tanah beserta bangunan.

### **2.1.3 Literasi Keuangan**

Literasi keuangan merujuk kepada suatu konsep yang mencakup pemahaman dan pengetahuan individu terhadap berbagai aspek keuangan, termasuk manajemen uang, investasi, tabungan, pinjaman, dan konsep dasar lainnya yang berhubungan dengan keuangan pribadi (Sanistasya et al., 2019). Dengan kata lain, literasi keuangan menitikberatkan pada kemampuan seseorang untuk memahami, menerapkan, dan mengelola informasi keuangan secara efektif. Masing masing anggota masyarakat yang mempunyai tingkat literasi keuangan yang condong dapat menciptakan pilihan keuangan yang lebih unggul, efisien dalam mengelola risiko, dan merencanakan masa depan finansial dengan lebih baik.

Signifikansi literasi keuangan bukan hanya terpaku pada tingkat personal, melainkan juga memberikan pengaruh yang substansial pada dampak yang signifikan pada tingkat sosial dan ekonomi masyarakat. Perorangan yang memiliki pemahaman finansial yang stabil cenderung cerdas dalam finansial, mengurangi tingkat ketidakpastian dalam kehidupan mereka, dan berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh. Oleh sebab itu, Pemahaman keuangan melibatkan lebih dari sekadar pengetahuan tentang istilah-istilah keuangan semata, namun juga dengan implementasi pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

peningkatan literasi keuangan, masyarakat dapat memperoleh keunggulan dalam mengelola risiko keuangan, mengoptimalkan investasi, dan merencanakan masa depan yang stabil secara finansial. Di era di mana kompleksitas pasar keuangan semakin meningkat, literasi keuangan menjadi keterampilan yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan finansial individu dan kelompok dalam jangka panjang.

Literasi sebagai suatu konsep, melibatkan lebih dari sekadar kemampuan membaca dan menulis secara umum. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang cara membaca dan menulis berbagai bentuk karya sastra, termasuk puisi, pantun, cerpen, novel, dan jenis tulisan lainnya (Fitri et al., 2023). Konsep keuangan mencakup dua dimensi yang tak terpisahkan, yaitu sebagai seni dan ilmu dalam mengelola aspek moneter. Dalam pengertian yang lebih luas, keuangan bukan hanya sekadar praktik administratif seputar uang, melainkan juga suatu bentuk seni yang melibatkan pengambilan keputusan bijak untuk mengelola sumber daya finansial (Aslam, n.d.).

Literasi keuangan, sebagai isu global, memiliki dampak yang meresap di hampir seluruh negara di dunia. Tingkat literasi keuangan yang rendah dapat menjadi penghambat serius bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Inklusi Keuangan (Fauzan, Jati Widagdo, 2023). Selain itu Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, teridentifikasi bahwa beberapa faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap literasi keuangan masyarakat melibatkan faktor-faktor seperti gender, tingkat pendidikan, serta omzet pendapatan. Variabilitas dalam literasi keuangan terkait erat dengan perbedaan jenis

kelamin, di mana perbedaan ini dapat memengaruhi pemahaman dan keterampilan keuangan seseorang.

Pada variabel independen literasi keuangan, terdapat sejumlah indikator yang dipergunakan untuk menilai tingkat pemahaman serta pengetahuan individu kepada berbagai aspek keuangan (Utami, 2023). Indikator tersebut melibatkan :

1. Pemahaman terhadap Prinsip Dasar Keuangan.
2. Pemahaman terhadap Produk Tabungan dan Peminjaman
3. Pemahaman terkait Strategi Investasi.

#### **2.1.4 Inklusi Keuangan**

Inklusi keuangan merupakan inisiatif dengan fokus utama untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan segala kendala, baik yang berupa faktor harga maupun non-harga, terhadap akses masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat optimal dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Saragih & Ritonga, 2022). Pada konteks ini, Inklusi keuangan memiliki tujuan mendasar untuk memberikan akses yang seimbang terhadap berbagai produk dan layanan keuangan, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal dalam memanfaatkan fasilitas keuangan. Upaya inklusi keuangan melibatkan pemberian akses terhadap produk perbankan, asuransi, serta layanan keuangan digital, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat secara keseluruhan. Selain hanya menyediakan akses, inklusi keuangan juga mencakup Inisiatif untuk menambah pemahaman serta pengetahuan penduduk terkait dengan produk serta layanan keuangan yang mereka gunakan. Inklusi keuangan, didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan dan pemanfaatan layanan perbankan oleh semua segmen masyarakat, telah



dijadikan agenda utama yang memperkaya peran industri perbankan. Konsep inklusi keuangan menekankan pentingnya memberikan peluang yang merata kepada setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi yang dimilikinya. Sebagai prioritas dalam industri perbankan, inklusi keuangan berusaha untuk merangkul masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, membuka pintu bagi partisipasi ekonomi yang lebih luas, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dalam jaringan layanan perbankan, inklusi keuangan menjadi landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan (Pratiwi et al., 2023).

Regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor 76/POJK.07/2017, regulasi ini menekankan pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan di bidang jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan masyarakat, secara jelas menggarisbawahi makna inklusi keuangan. Inklusi keuangan dalam konteks ini merujuk pada upaya Meluaskan ketersediaan jangkauan masyarakat terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sejalan dengan kebutuhan dan kapabilitas masing-masing individu.

Dalam mengukur inklusi keuangan, terdapat indikator yang perlu dilibatkan sebagai berikut(Utami, 2023):

1. Ketersediaan atau akses, penggunaan, dan aktualitas produk serta jasa.
2. Kualitas produk atau jasa

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Temuan dari penelitian sebelumnya mengenai topik yang terkait dengan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh (Sanistasya et al., 2019) atas judul dampak Literasi Keuangan dan *financial Inclusion* kepada penilaian kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa dimana tingkat literasi keuangan mempunyai pengaruh yang termasuk signifikan kepada performa bisnis skala kecil, sedangkan inklusi keuangan secara konsisten memberikan dampak yang *actual* kepada kinerja usaha kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ruli & Hilmawati, 2021) dengan judul *financial Inclusion and Financial Literacy Impact on the Performance and Sustainability of the Micro, Small, and Medium-sized Enterprises (MSME) Sector* dapat disimpulkan temuan riset menegaskan bahwa inklusi keuangan tidak memiliki dampak pada kinerja dan keberlangsungan bidang UMKM. Sebaliknya, literasi keuangan terbukti berperan penting dalam memengaruhi kinerja dan keberlanjutan bidang UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2022) dengan judul Determinasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan Usaha dapat disarikan bahwa literasi keuangan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja usaha mikro, kecil, menengah, sementara inklusi keuangan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha mikro, kecil, menengah..

Penelitian yang dilakukan oleh (Saragih & Ritonga, 2022) dengan judul Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. Kesimpulannya, literasi keuangan memainkan peran penting dan signifikan dalam memengaruhi kinerja usaha mikro, kecil,

menengah. Sementara itu, inklusi keuangan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja usaha mikro, kecil, menengah.

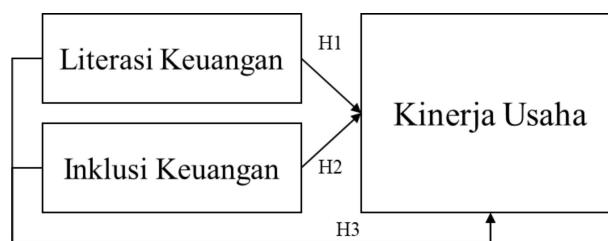
Penelitian yang dilakukan oleh (Rita, 2021) dengan judul Mediasi Perilaku Pengelolaan Keuangan dalam Pengaruh Fintech dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha. Kesimpulannya, literasi keuangan memiliki dampak positif yang nyata terhadap performa usaha, memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kinerja bidang keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aribawa et al., 2020) dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi keuangan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja usaha UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wuryani, 2020) dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Sidoarjo Menggambarkan bahwa perkembangan kinerja UMKM di Sidoarjo dipengaruhi secara substansial oleh tingkat literasi keuangan dan tingkat inklusi keuangan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang menjadi dasar pengembangan penelitian dapat dilihat dari gambar berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1 Literasi Keuangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Usaha Mikro**

Literasi keuangan atau *financial literacy* mencakup pemahaman yang efektif tentang manajemen keuangan dan memberikan dukungan pada proses pengambilan keputusan bisnis. Sebagaimana diakui secara luas, literasi keuangan memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja Usaha Mikro. Semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku usaha mikro dalam mengelola aspek keuangan, semakin unggul pula kinerja usaha mikro tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan dapat membantu usaha mikro dalam mengoptimalkan kinerja bisnisnya dan menjalankan operasionalnya dengan cermat. Beberapa penelitian yang mendemonstrasikan bahwa literasi keuangan secara positif dan bermakna memengaruhi kinerja keuangan adalah (Ruli & Hilmawati, 2021), (Sari et al., 2022) & (Saragih & Ritonga, 2022). Dengan merujuk pada pemaparan sebelumnya yang menyatakan Dengan adanya bukti bahwa literasi keuangan memiliki dampak positif terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dapat diasumsikan bahwa relasi antara literasi keuangan dan kinerja usaha mikro dapat diungkapkan sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1): Literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja usaha mikro.

### **2.4.2 Inklusi Keuangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Usaha Mikro**

Keterlibatan dalam inklusi keuangan atau *financial Inclusion* menunjukkan signifikansi dalam memacu percepatan pertumbuhan ekonomi. Inklusi keuangan berperan krusial dalam mengoptimalkan fungsi bidang keuangan, serta memperluas

jangkauan layanan keuangan untuk pelaku usaha Usaha Mikro dengan sebesar-besarnya. Akses yang disediakan oleh lembaga keuangan memegang peranan yang strategis dalam meningkatkan kinerja usaha mikro dan merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Pencapaian oleh pelaku usaha mikro dapat dipengaruhi oleh Pendanaan yang diperoleh melalui lembaga keuangan memainkan peran krusial dalam konteks ini. Inklusi keuangan yang efektif membuka peluang bagi pelaku usaha mikro untuk merajut pertumbuhan bisnis mereka, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan kinerja usaha mikro. Dengan peningkatan tingkat inklusi keuangan di kalangan pelaku usaha mikro, kinerja mereka juga akan mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Beberapa riset menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yakni (Rita, 2021), (Manajemen, 2020), dan (Fajri et al., n.d.). Dengan merujuk pada pemaparan sebelumnya Yang menegaskan bahwa inklusi keuangan memberikan dampak positif pada kinerja Usaha Mikro, dapat diasumsikan bahwa formulasi hubungan antara literasi keuangan dan kinerja usaha mikro adalah sebagai berikut:

Hipotesis 2 (H2): Inklusi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja usaha mikro.

### **2.4.3 Literasi Keuangan & Inklusi Keuangan secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kinerja Usaha Mikro**

Literasi keuangan dan inklusi keuangan memegang peran sentral dalam kesuksesan Usaha Mikro. Pemahaman mendalam tentang konsep keuangan melalui literasi keuangan menjadi kunci untuk pengusaha usaha mikro dalam

memanajemen aspek keuangan dengan efektif. Dengan pemahaman keuangan yang matang, pelaku usaha mikro dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan, membuat keputusan cerdas, dan meningkatkan daya saing bisnis, termasuk persepsi terhadap pasar dan peluang investasi.

Beberapa penelitian yang menegaskan bahwa Literasi & Inklusi Keuangan keuangan berpengaruh signifikan serta positif terhadap kinerja keuangan yakni (Dwitya Diah Arimbi, 2023) & (Mushoffa & Budiman, 2023). Dengan merujuk pada pemaparan sebelumnya yang menyatakan bahwa Literasi & Inklusi keuangan memiliki dampak positif terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dapat diasumsikan bahwa korelasi antara literasi keuangan dan kinerja usaha mikro dapat diformulasikan sebagai berikut:

Hipotesis 3 (H3): Literasi keuangan dan Inklusi keuangan secara simultan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja usaha mikro.